

TATA KELOLA KOMUNIKASI BERBASIS ADAT DALAM PENGELOLAAN TELEVISI KOMUNITAS: STUDI KASUS CIGA TV DI KASEPUHAN GELARALAM

Rangga Saptia Mohamad Permana, dan Jimi Narotama Mahameruaji

Program Studi Televisi dan Film, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Sumedang

E-mail : rangga.saptia@unpad.ac.id; mahameruaji@unpad.ac.id

*E-mail Korespondensi : rangga.saptia@unpad.ac.id.

ABSTRAK. Perkembangan teknologi digital telah mendorong semakin banyak masyarakat adat memanfaatkan media komunikasi untuk mendokumentasikan dan mewariskan pengetahuan budaya. Namun, kajian mengenai media komunitas masih didominasi oleh pembahasan mengenai fungsi pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat, sementara mekanisme tata kelola komunikasi yang memungkinkan teknologi tetap berada di bawah kendali masyarakat adat belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola komunikasi berbasis adat dalam pengelolaan CIGA TV sebagai televisi komunitas di Kasepuhan Gelaralam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara semi-terstruktur terhadap Yoyo Yogaswara sebagai *jambatan* Kasepuhan Gelaralam serta telaah berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan CIGA TV berlandaskan falsafah *kudu bisa ngigelan jaman, tapi ulah kabawa ku jaman*, yang menjadi dasar masyarakat adat dalam menerima sekaligus mengendalikan perkembangan teknologi komunikasi. Falsafah tersebut diwujudkan melalui pembentukan televisi komunitas, mekanisme tata kelola komunikasi berbasis adat, praktik produksi media, serta pemanfaatan infrastruktur komunikasi yang seluruhnya berada di bawah otoritas kelembagaan adat. Penelitian ini berargumen bahwa keberhasilan CIGA TV tidak terutama ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh tata kelola komunikasi berbasis adat yang mengintegrasikan nilai budaya, kelembagaan komunitas, dan teknologi komunikasi ke dalam suatu sistem yang menjaga keberlanjutan komunikasi masyarakat adat. Temuan ini memperluas kajian media komunitas dengan menawarkan konsep tata kelola komunikasi berbasis adat (*indigenous communication governance*) sebagai perspektif untuk memahami hubungan antara masyarakat adat, media komunitas, dan teknologi digital.

Kata Kunci: Tata kelola komunikasi berbasis adat; televisi komunitas; masyarakat adat; CIGA TV; Kasepuhan Gelaralam

INDIGENOUS COMMUNICATION GOVERNANCE IN COMMUNITY TELEVISION: A CASE STUDY OF CIGA TV IN KASEPUHAN GELARALAM

ABSTRACT. The rapid development of digital technologies has encouraged many Indigenous communities to adopt communication media for documenting and transmitting cultural knowledge. However, existing studies on community media have largely focused on cultural preservation and community empowerment, while paying limited attention to the communication governance mechanisms that enable Indigenous communities to retain authority over technology. This study examines indigenous communication governance in the management of CIGA TV, a community television station operated by the Kasepuhan Gelaralam Indigenous community in Indonesia. Employing a qualitative case study approach, the research draws on semi-structured interviews with Yoyo Yogaswara as the community *jambatan* (liaison) and a review of relevant documents and scholarly literature. The findings reveal that CIGA TV is governed by the Indigenous philosophy of *kudu bisa ngigelan jaman, tapi ulah kabawa ku jaman* ("adapting to the times without being carried away by them"), which guides the community in adopting while regulating communication technologies. This philosophy is institutionalized through the establishment of community television, Indigenous-based communication governance, media production practices, and the management of communication infrastructure under customary authority. The study argues that the sustainability of CIGA TV is determined not primarily by technological sophistication, but by an Indigenous communication governance system that integrates cultural values, customary institutions, and communication technologies into a coherent framework sustaining Indigenous communication systems. These findings contribute to community media scholarship by proposing indigenous communication governance as a conceptual perspective for understanding the relationship between Indigenous communities, community television, and digital technologies.

Keywords: Indigenous communication governance; community television; Indigenous communities; CIGA TV; Kasepuhan Gelaralam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat di berbagai belahan

dunia memproduksi, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan budaya. Jika sebelumnya teknologi komunikasi sering dipandang sebagai faktor yang mempercepat homogenisasi budaya

melalui dominasi media arus utama, dalam beberapa dekade terakhir muncul kecenderungan yang menunjukkan bahwa teknologi juga dapat dimanfaatkan oleh komunitas lokal dan masyarakat adat untuk memperkuat identitas budaya serta mempertahankan sistem pengetahuan mereka. Dalam konteks ini, media digital tidak lagi dipahami semata sebagai perangkat teknologi, melainkan sebagai ruang sosial yang memungkinkan komunitas membangun representasi dirinya sendiri, mendokumentasikan praktik-praktik budaya, serta menghubungkan pengetahuan lokal dengan ruang publik yang lebih luas. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara teknologi dan budaya tidak selalu bersifat antagonistik, tetapi dapat berkembang menjadi hubungan yang saling menyesuaikan sesuai dengan nilai, norma, dan kebutuhan masing-masing komunitas (Priyadharma, 2024).

Di Indonesia, perkembangan teknologi komunikasi juga telah dimanfaatkan oleh berbagai komunitas adat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan pengetahuan lokal di tengah arus modernisasi. Berbagai media digital, seperti media sosial, situs web, dan platform berbagi video, mulai digunakan untuk mendokumentasikan tradisi, menyebarluaskan informasi mengenai kehidupan masyarakat adat, serta memperkenalkan nilai-nilai budaya kepada khalayak yang lebih luas. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak selalu berada pada posisi yang berlawanan dengan perkembangan teknologi. Sebaliknya, teknologi diperlakukan sebagai sarana yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan komunitas tanpa harus mengorbankan nilai-nilai budaya yang menjadi fondasi kehidupan mereka. Dengan demikian, relasi antara teknologi dan masyarakat adat tidak lagi dipahami sebagai hubungan yang bersifat dikotomis—antara tradisi dan modernitas—melainkan sebagai proses negosiasi yang memungkinkan keduanya berjalan secara berdampingan.

Salah satu contoh yang menarik dapat ditemukan pada masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Komunitas ini dikenal luas karena kemampuannya mengintegrasikan berbagai inovasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari tanpa meninggalkan tata nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Prinsip "*Kudu Bisa Ngigelan Jaman, Tapi Ulah Kabawa Ku Jaman*" (mengikuti perkembangan zaman tanpa terbawa oleh perkembangan zaman) menjadi landasan filosofis dalam menyikapi berbagai perubahan sosial dan teknologi (Priyadharma, 2024). Prinsip

tersebut tidak hanya tercermin dalam pemanfaatan teknologi pertanian, energi, maupun komunikasi, tetapi juga dalam cara masyarakat Kasepuhan Gelaralam membangun media komunitas sebagai bagian dari sistem kehidupan adat mereka.

Kemampuan masyarakat Kasepuhan Gelaralam dalam mengadaptasi teknologi berakar pada cara pandang mereka terhadap perubahan sosial. Bagi masyarakat adat ini, perkembangan teknologi tidak diposisikan sebagai ancaman terhadap tradisi, melainkan sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan selama tetap berada dalam koridor nilai dan norma adat (Priyadharma, 2024). Oleh karena itu, berbagai bentuk inovasi—mulai dari pemanfaatan energi mikrohidro, teknologi pertanian, hingga media komunikasi—dikembangkan bukan untuk menggantikan tradisi, melainkan untuk mendukung keberlangsungan sistem sosial dan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks tersebut, teknologi memperoleh legitimasi bukan karena kebaruannya, tetapi karena kemampuannya menjalankan fungsi-fungsi yang selaras dengan kepentingan komunitas adat.

Salah satu manifestasi dari cara pandang tersebut adalah lahirnya CIGA TV, sebuah televisi komunitas yang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat Kasepuhan Gelaralam. Sejak mulai beroperasi pada tahun 2008, CIGA TV tidak hanya berfungsi sebagai media penyiaran lokal, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendokumentasikan berbagai aktivitas adat, menyebarluaskan informasi kepada warga, serta merekam pengetahuan budaya yang sebelumnya diwariskan terutama melalui tradisi lisan. Berbeda dengan televisi komersial yang berorientasi pada pasar dan jumlah pemirsa, CIGA TV dibangun untuk memenuhi kebutuhan komunikasi komunitas itu sendiri. Pengelolaan stasiun televisi ini melibatkan masyarakat adat sebagai produsen konten, didukung oleh infrastruktur yang sebagian besar dikembangkan secara mandiri, serta dijalankan berdasarkan nilai-nilai dan otoritas adat yang berlaku di Kasepuhan Gelaralam (Priyadharma, 2026).

Keberadaan CIGA TV sebagai televisi komunitas masyarakat adat telah menarik perhatian sejumlah peneliti dari berbagai perspektif. Sebagian besar penelitian memosisikan CIGA TV sebagai media yang berperan dalam pelestarian budaya, pewarisan nilai-nilai adat, serta penguatan identitas komunitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2025), misalnya, menunjukkan bahwa CIGA TV berfungsi sebagai media pelestarian budaya melalui dokumentasi

berbagai aktivitas adat, penyebarluasan pengetahuan lokal, dan penyajian konten yang merepresentasikan kehidupan masyarakat Kasepuhan Gelaralam. Dalam perspektif tersebut, televisi komunitas dipandang sebagai sarana untuk memastikan nilai-nilai budaya tetap dapat diwariskan kepada generasi berikutnya di tengah perkembangan teknologi komunikasi.

Perspektif yang relatif serupa juga ditemukan dalam penelitian Priyadharma (2026) yang menempatkan CIGA TV sebagai media komunitas yang berfungsi menjaga keberlangsungan tatanan adat (*custodians of the ancestral order*). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa televisi komunitas tidak hanya menjadi saluran informasi bagi masyarakat Kasepuhan Gelaralam, tetapi juga menjadi medium untuk merepresentasikan identitas budaya, memperkuat solidaritas komunitas, serta mendukung keberlanjutan praktik-praktik adat melalui produksi konten yang berakar pada kehidupan masyarakat setempat. Di sisi lain, penelitian mengenai transformasi digital masyarakat adat juga memperlihatkan bahwa pemanfaatan berbagai teknologi komunikasi oleh komunitas Kasepuhan merupakan bagian dari kemampuan mereka mengadaptasi perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Priyadharma, 2024). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa CIGA TV telah dipahami sebagai media yang memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan adaptasi masyarakat adat terhadap perkembangan teknologi digital.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan fungsi CIGA TV sebagai media pelestarian budaya, media komunitas, maupun media adaptasi teknologi masyarakat adat, perhatian terhadap mekanisme komunikasi yang memungkinkan fungsi-fungsi tersebut dapat berlangsung secara berkelanjutan masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada keluaran (*output*) CIGA TV, seperti dokumentasi budaya, penguatan identitas komunitas, atau representasi kehidupan masyarakat adat. Sementara itu, aspek-aspek yang membentuk keberlangsungan media tersebut—meliputi tata kelola komunikasi, proses produksi konten, pengendalian informasi berdasarkan nilai-nilai adat, pengelolaan sumber daya, hingga regenerasi pelaku media—belum banyak dipahami sebagai bagian dari suatu sistem komunikasi masyarakat adat yang utuh. Akibatnya, CIGA TV lebih sering diposisikan sebagai instrumen pelestarian budaya daripada sebagai institusi komunikasi yang dibangun dan dijalankan

berdasarkan logika sosial serta tata nilai komunitas adat.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini memandang CIGA TV tidak hanya sebagai media komunitas yang menghasilkan berbagai konten budaya, tetapi sebagai bagian dari sistem komunikasi masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam. Perspektif ini memungkinkan penelitian untuk melihat bagaimana praktik komunikasi dibangun melalui keterkaitan antara tata kelola media, nilai-nilai adat, infrastruktur komunikasi, produksi pengetahuan, dan partisipasi masyarakat dalam satu kesatuan yang saling menopang. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata berupaya menjelaskan fungsi CIGA TV, melainkan berusaha memahami bagaimana masyarakat adat membangun dan mempertahankan sistem komunikasinya sendiri melalui media komunitas di tengah perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya memahami bagaimana praktik komunikasi masyarakat adat dijalankan melalui CIGA TV sebagai televisi komunitas di Kasepuhan Gelaralam. Fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada fungsi media sebagai sarana penyebaran informasi atau pelestarian budaya, tetapi juga pada cara masyarakat adat mengelola proses komunikasi melalui tata kelola organisasi, produksi konten, pemanfaatan infrastruktur, serta mekanisme pengendalian informasi yang berlandaskan nilai-nilai adat. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat CIGA TV sebagai praktik sosial yang merefleksikan hubungan antara budaya, teknologi, dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat adat.

Berdasarkan fokus tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: Bagaimana praktik komunikasi masyarakat adat diwujudkan melalui pengelolaan CIGA TV di Kasepuhan Gelaralam? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik komunikasi yang membentuk keberlangsungan CIGA TV sebagai televisi komunitas masyarakat adat, sekaligus menjelaskan bagaimana praktik tersebut memungkinkan komunitas mempertahankan nilai-nilai budaya di tengah perkembangan teknologi digital. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian media komunitas dengan menawarkan perspektif yang tidak hanya memandang televisi komunitas sebagai media pelestarian budaya, tetapi juga sebagai praktik komunikasi yang dibangun melalui tata kelola komunitas, pengelolaan pengetahuan, serta relasi antara teknologi dan nilai-nilai adat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menempatkan CIGA TV

terutama sebagai media pelestarian budaya dan pemberdayaan masyarakat, penelitian ini berargumen bahwa kontribusi utama CIGA TV terletak pada praktik tata kelola komunikasi berbasis adat yang memungkinkan masyarakat mengintegrasikan teknologi digital ke dalam sistem sosial dan budaya mereka tanpa kehilangan otoritas adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami praktik komunikasi yang diwujudkan melalui pengelolaan CIGA TV sebagai televisi komunitas masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai makna, proses, dan praktik sosial yang melatarbelakangi keberadaan CIGA TV dalam kehidupan masyarakat adat, bukan mengukur hubungan antarvariabel sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena dalam konteks alamiahnya dengan menafsirkan makna yang diberikan oleh para pelaku terhadap pengalaman dan praktik sosial yang mereka jalankan (Denzin & Lincoln, 2017). Oleh karena itu, pendekatan ini dinilai sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami praktik komunikasi masyarakat adat dalam mengelola media komunitas sebagai bagian dari sistem kehidupan sosial dan budaya.

Desain studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu kasus yang memiliki karakteristik khas, yaitu CIGA TV sebagai televisi komunitas yang dimiliki, dikelola, dan dikembangkan oleh masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam. Studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk mengkaji suatu fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas (Yin, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami hubungan antara fenomena yang diteliti dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan yang melingkupinya. Dalam penelitian ini, keberadaan CIGA TV tidak dipahami sebagai organisasi media yang berdiri sendiri, melainkan sebagai praktik komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial dan nilai-nilai adat masyarakat Kasepuhan Gelaralam.

Objek penelitian ini adalah praktik komunikasi yang diwujudkan melalui pengelolaan CIGA TV sebagai televisi komunitas masyarakat

adat Kasepuhan Gelaralam. Adapun unit analisis penelitian meliputi praktik-praktik komunikasi yang membentuk keberlangsungan CIGA TV, seperti tata kelola media, proses produksi konten, pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan infrastruktur komunikasi, serta mekanisme pengendalian informasi yang didasarkan pada nilai-nilai adat. Penentuan unit analisis tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya ingin mengetahui fungsi CIGA TV sebagai media komunitas, tetapi juga memahami bagaimana praktik-praktik komunikasi tersebut membentuk sistem pengelolaan media dalam kehidupan masyarakat adat (Stake, 2009), (Yin, 2018).

Data penelitian diperoleh melalui triangulasi berbagai sumber data agar diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Teknik pertama adalah wawancara semi-terstruktur dengan Yoyo Yogaswara selaku juru bicara Kasepuhan Gelaralam dan salah satu pengelola CIGA TV. Peneliti melakukan wawancara ini pada tanggal 16 Juli 2026 di kediaman Yoyo. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk mengeksplorasi informasi yang berkembang selama proses wawancara tanpa kehilangan fokus penelitian (Kvale & Brinkmann, 2009). Informasi yang digali mencakup sejarah berdirinya CIGA TV, tujuan pendiriannya, struktur organisasi, proses produksi konten, sumber daya manusia, infrastruktur penyiaran, mekanisme penyaringan konten, serta nilai-nilai adat yang menjadi dasar pengelolaan televisi komunitas tersebut.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumen terhadap artikel ilmiah, prosiding, berita, dan berbagai publikasi yang membahas masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam maupun CIGA TV. Analisis dokumen dilakukan untuk memperoleh informasi kontekstual, memahami perkembangan penelitian sebelumnya, sekaligus melakukan triangulasi terhadap data hasil wawancara dan observasi. Penggunaan berbagai sumber bukti dalam penelitian studi kasus merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan validitas konstruksi (*construct validity*) penelitian (Yin, 2018).



Gambar 1. Yoyo Yogaswara, juru bicara Kasepuhan Gelaralam
Sumber: Dokumentasi Penulis

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2018) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengorganisasikan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikondensasi disajikan dalam bentuk kategori dan tema-tema yang menggambarkan praktik komunikasi masyarakat adat dalam mengelola CIGA TV. Tahap terakhir dilakukan melalui proses interpretasi untuk menemukan hubungan antartema sehingga diperoleh pemahaman mengenai praktik komunikasi yang menopang keberlangsungan televisi komunitas tersebut (Miles et al., 2018).

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi terhadap konten CIGA TV, serta berbagai dokumen pendukung. Triangulasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan (*trustworthiness*) hasil penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber (Lincoln & Guba, 1985). Selain itu, proses analisis dilakukan secara berulang (*iterative analysis*) agar interpretasi yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada pola-pola yang konsisten dalam data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi *Ngigelan Jaman* sebagai Dasar Tata Kelola Teknologi Komunikasi

Hubungan antara masyarakat adat dan perkembangan teknologi sering kali dipahami secara dikotomis. Di satu sisi, masyarakat adat kerap dipersepsikan sebagai kelompok yang mempertahankan tradisi dengan menolak modernisasi. Di sisi lain, perkembangan teknologi dipandang sebagai kekuatan yang berpotensi mengikis nilai-nilai budaya lokal. Pandangan seperti ini semakin dipertanyakan oleh berbagai penelitian mengenai media komunitas dan masyarakat adat yang menunjukkan bahwa teknologi tidak selalu menjadi ancaman bagi keberlangsungan budaya. Sebaliknya, teknologi dapat diadopsi secara selektif dan ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat identitas budaya, memperluas ruang komunikasi komunitas, serta menjaga keberlanjutan pengetahuan

lokal apabila pengelolaannya berada di bawah kendali masyarakat itu sendiri (Gordon & Lopez, 2019), (Rennie, 2006), (Rodríguez et al., 2014).

Dalam konteks masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam, penerimaan terhadap teknologi juga tidak didasarkan pada logika modernisasi yang menggantikan tradisi, melainkan pada falsafah hidup yang menempatkan adat sebagai rujukan utama dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip yang sering diungkapkan oleh masyarakat Kasepuhan adalah "*kudu bisa ngigelan jaman, tapi ulah kabawa ku jaman*", yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai keharusan mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri budaya. Falsafah tersebut bukan sekadar slogan, melainkan menjadi pedoman dalam menentukan bagaimana berbagai bentuk teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung kehidupan masyarakat tanpa menggeser otoritas adat. Pergeseran pusat pemerintahan (*ngalalakon*), misalnya, menunjukkan bahwa perubahan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Kasepuhan, tetapi perubahan tersebut selalu berlangsung dalam kerangka nilai dan aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun (Latif, 2023). Demikian pula, penelitian mahasiswa Universitas Gadjah Mada mengenai masyarakat adat Ciptagelar (kini Gelaralam) menunjukkan bahwa teknologi diterima sejauh mampu mendukung keberlanjutan tradisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip adat yang berlaku (Trisfian, 2024).

Pandangan tersebut juga tercermin dalam penjelasan Yoyo Yogaswara mengenai filosofi masyarakat adat dalam memanfaatkan teknologi komunikasi. Menurutnya, perkembangan teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi harus ditempatkan sebagai sarana yang membantu masyarakat menjalankan adat dan mendokumentasikan pengetahuan yang diwariskan antargenerasi. Sebagaimana disampaikan Yoyo: "*Kudu bisa ngigelan jaman, tapi ulah kabawa ku jaman. Teknologi dipakai selama bisa membantu masyarakat dan tidak membuat kami meninggalkan adat.*" (Yoyo Yogaswara, wawancara pribadi, 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keputusan untuk menggunakan teknologi tidak didasarkan pada pertimbangan efisiensi semata, melainkan melalui proses seleksi yang mempertimbangkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai adat. Dalam pengertian ini, teknologi tidak memiliki posisi yang lebih tinggi daripada budaya, tetapi justru berada di bawah otoritas sistem sosial masyarakat adat.

Temuan ini sejalan dengan laporan Association for Progressive Communications

(APC) yang menunjukkan bahwa masyarakat Kasepuhan Ciptagelar memanfaatkan berbagai media komunikasi—termasuk Radio Swara Ciptagelar, CIGA TV, YouTube, Instagram, dan TikTok—untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal, memperkuat komunikasi internal, serta membangun hubungan dengan masyarakat di luar komunitas (Roveri, 2026). Namun, penyebaran informasi tersebut tetap berada di bawah pengawasan komunitas melalui peran *jambatan*, yang menentukan informasi mana yang dapat dipublikasikan kepada publik dan mana yang tetap menjadi konsumsi internal masyarakat adat (Priyadharma, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak mengurangi otoritas adat, melainkan memperluas cara masyarakat menjalankan fungsi-fungsi komunikasi berdasarkan aturan yang telah disepakati bersama.

Dengan demikian, adopsi teknologi di Kasepuhan Gelaralam tidak dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan tanpa syarat terhadap modernitas. Sebaliknya, teknologi mengalami proses negosiasi melalui nilai-nilai adat sehingga setiap inovasi yang diterapkan harus mampu mendukung keberlangsungan kehidupan komunitas. Dalam perspektif ini, falsafah *ngigelan jaman* berfungsi sebagai mekanisme budaya yang mengatur hubungan antara masyarakat adat dan teknologi komunikasi. Prinsip inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai media komunitas di Kasepuhan Gelaralam, termasuk CIGA TV, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

CIGA TV sebagai Manifestasi Praktik Komunikasi Masyarakat Adat

Keputusan masyarakat Kasepuhan Gelaralam untuk membangun CIGA TV tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mengikuti perkembangan teknologi penyiaran ataupun menghadirkan alternatif terhadap media arus utama. Sebaliknya, keberadaan televisi komunitas tersebut merupakan perwujudan dari cara masyarakat adat memaknai komunikasi sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan sosial dan budaya. Dalam perspektif ini, media tidak ditempatkan sebagai institusi yang berdiri terpisah dari komunitas, melainkan sebagai ruang tempat pengetahuan, nilai, dan praktik adat diproduksi, dipertukarkan, serta diwariskan antargenerasi. Oleh karena itu, lahirnya CIGA TV merupakan konsekuensi logis dari falsafah *ngigelan jaman*, yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa melepaskan otoritas adat sebagai dasar pengambilan keputusan (Latif, 2023), (Trisfian, 2024).

Berbeda dengan televisi komersial yang orientasi utamanya adalah memperoleh audiens dan keuntungan ekonomi, CIGA TV sejak awal dibangun untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat adat sendiri. Berbagai konten yang diproduksi tidak diarahkan untuk mengejar popularitas, melainkan untuk mendokumentasikan aktivitas adat, menyebarluaskan informasi kepada warga, serta menjaga kesinambungan pengetahuan lokal. Liputan mengenai ritual adat, kegiatan pertanian, kesenian, musyawarah komunitas, hingga aktivitas sehari-hari masyarakat menjadi bagian dari arsip audiovisual yang dapat diakses oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, fungsi utama CIGA TV bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun memori kolektif masyarakat melalui media audiovisual (Rachman et al., 2025), (Tifani, 2023).

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Yoyo Yogaswara yang menegaskan bahwa keberadaan CIGA TV lahir dari kebutuhan masyarakat untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan berbagai aktivitas adat kepada warga, sekaligus memperkenalkan kehidupan Kasepuhan kepada masyarakat di luar komunitas. Menurutnya,

"CIGA TV bukan dibuat supaya seperti televisi nasional. Kami membuatnya supaya kegiatan adat bisa didokumentasikan, masyarakat tahu apa yang sedang dikerjakan, dan orang luar juga bisa melihat kehidupan kami tanpa harus mengubah adat kami." (Yoyo Yogaswara, wawancara pribadi, 2026).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa CIGA TV tidak dibangun berdasarkan logika industri media, tetapi berdasarkan kebutuhan komunikasi komunitas. Produksi konten dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan pengetahuan adat sekaligus membangun jembatan komunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, dokumentasi audiovisual bukan hanya berfungsi sebagai arsip, tetapi juga menjadi medium pewarisan pengetahuan yang sebelumnya lebih banyak disampaikan melalui tradisi lisan. Pergeseran dari tradisi lisan menuju dokumentasi digital tidak berarti menggantikan cara-cara lama dalam mentransmisikan budaya, melainkan memperluas medium yang digunakan untuk menjaga keberlanjutan pengetahuan lokal.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian Priyadharma yang menunjukkan bahwa Radio Swara Ciptagelar dan CIGA TV berfungsi sebagai *community interest media*, yaitu media yang dibangun untuk memenuhi kepentingan komunitas dan memperkuat kapasitas masyarakat

adat dalam menghadapi perubahan teknologi digital (Priyadharma, 2026). Menurut laporan Association for Progressive Communications (APC), berbagai media yang dikembangkan masyarakat Kasepuhan Gelaralam bukan hanya menjadi saluran komunikasi internal, tetapi juga menjadi ruang belajar bagi generasi muda, media dokumentasi pengetahuan lokal, serta sarana membangun dialog dengan masyarakat di luar komunitas. Menariknya, seluruh proses tersebut tetap berada di bawah pengawasan lembaga adat sehingga keterbukaan informasi tidak menghilangkan kontrol komunitas atas pengetahuan yang dimilikinya (Roveri, 2026).

Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa keberadaan CIGA TV memperluas pemahaman mengenai konsep media komunitas sebagaimana dijelaskan oleh Rennie (2006). Rennie menekankan bahwa media komunitas dibangun melalui partisipasi warga, pengelolaan yang berbasis kebutuhan lokal, dan orientasi pelayanan terhadap komunitas. Akan tetapi, kasus CIGA TV menunjukkan dimensi tambahan yang belum banyak dibahas dalam literatur media komunitas, yaitu bahwa legitimasi media tidak hanya berasal dari partisipasi masyarakat, tetapi juga dari otoritas budaya yang mengatur bagaimana media tersebut dijalankan. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat berlangsung di dalam kerangka tata nilai adat yang telah disepakati bersama. Hal ini menjadikan CIGA TV bukan sekadar media partisipatif, melainkan media yang berfungsi sebagai institusi sosial budaya yang menghubungkan teknologi komunikasi dengan sistem pemerintahan adat.

Dengan demikian, CIGA TV tidak dapat dipahami hanya sebagai saluran penyiaran lokal ataupun media pelestarian budaya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa televisi komunitas tersebut merupakan manifestasi dari praktik komunikasi masyarakat adat yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan komunitas, menjaga kesinambungan pengetahuan lokal, serta memperluas hubungan dengan masyarakat luar tanpa melepaskan kendali adat atas proses komunikasi. Posisi inilah yang membedakan CIGA TV dari banyak media komunitas lainnya dan menjadi dasar untuk memahami bagaimana tata kelola komunikasi masyarakat adat dijalankan dalam praktik sehari-hari. Pembahasan mengenai tata kelola tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Tata Kelola Komunikasi dalam Pengelolaan CIGA TV

Keberhasilan CIGA TV sebagai media komunikasi masyarakat adat tidak semata-mata

ditentukan oleh ketersediaan perangkat teknologi maupun kemampuan produksi konten, tetapi oleh sistem tata kelola komunikasi yang menopang seluruh proses pengambilan keputusan di dalamnya. Berbeda dengan organisasi media modern yang umumnya bertumpu pada struktur birokrasi formal, pembagian kerja profesional, dan pertimbangan pasar, tata kelola CIGA TV berakar pada sistem sosial masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam. Dengan demikian, media tidak diposisikan sebagai institusi yang berdiri di luar komunitas, melainkan menjadi bagian dari tata pemerintahan adat yang menjalankan fungsi komunikasi sesuai dengan norma, nilai, dan otoritas budaya yang berlaku. Dalam perspektif ini, komunikasi bukan hanya persoalan penyampaian informasi, tetapi juga mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap perkembangan teknologi dan perlindungan terhadap pengetahuan adat (Priyadharma, 2026), (Rennie, 2006).



Gambar 2. Proses penyiaran CIGA TV dengan *software* OBS Studio

Sumber: Dokumentasi Penulis

Salah satu karakteristik utama tata kelola tersebut adalah bahwa setiap aktivitas komunikasi berlangsung di bawah legitimasi kepemimpinan adat. Struktur pengelolaan CIGA TV tidak dibangun melalui mekanisme korporasi ataupun lembaga penyiaran formal, melainkan melalui pembagian peran yang mengikuti sistem organisasi masyarakat Kasepuhan. Posisi-posisi yang terlibat dalam produksi dan penyebaran informasi memperoleh legitimasi dari kepercayaan komunitas serta hubungan mereka dengan struktur adat. Dengan demikian, pengelolaan media tidak dipisahkan dari sistem pemerintahan adat, tetapi menjadi salah satu instrumen yang

mendukung penyelenggaraan kehidupan sosial masyarakat.

Yoyo Yogaswara menjelaskan bahwa setiap informasi yang dipublikasikan melalui CIGA TV tidak serta-merta dapat disiarkan kepada publik. Informasi tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan berdasarkan kepentingannya bagi masyarakat serta kesesuaiannya dengan aturan adat yang berlaku. Yoyo berujar, *"Tidak semua kegiatan adat bisa dipublikasikan. Ada yang memang boleh diketahui masyarakat luas, tetapi ada juga yang hanya untuk warga kasepuhan. Kami selalu melihat dulu apakah informasi itu memang pantas dibagikan atau tidak. Jadi, media bukan tempat membuka semuanya, tetapi tempat menyampaikan apa yang memang boleh disampaikan."* (Yoyo Yogaswara, wawancara pribadi, 2026)

Kutipan tersebut memperlihatkan bahwa proses komunikasi di CIGA TV tidak didasarkan pada prinsip keterbukaan informasi tanpa batas, melainkan pada selektivitas komunikasi yang dikendalikan oleh norma adat. Dalam konteks ini, keputusan mengenai isi media tidak ditentukan oleh pertimbangan popularitas, algoritma digital, ataupun kepentingan ekonomi, tetapi oleh pertimbangan budaya mengenai pengetahuan apa yang dapat dibagikan kepada publik dan apa yang harus tetap berada dalam ruang internal komunitas. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa masyarakat adat tidak hanya menjadi pengguna teknologi komunikasi, tetapi juga memiliki otoritas untuk menentukan batas-batas sirkulasi informasi yang mereka miliki.

Temuan ini selaras dengan laporan Association for Progressive Communications (APC) yang menjelaskan bahwa Yoyo Yogaswara menjalankan fungsi sebagai *jambatan*, yaitu penghubung antara masyarakat adat dengan dunia luar yang sekaligus bertugas menyaring informasi sebelum dipublikasikan melalui media digital. Menurut laporan tersebut, terdapat perbedaan yang jelas antara informasi yang disampaikan melalui media internal komunitas, seperti Radio Swara Ciptagelar, dan informasi yang didistribusikan kepada khalayak luas melalui CIGA TV, YouTube, Instagram, maupun TikTok (Roveri, 2026). Mekanisme ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak menghilangkan kontrol masyarakat adat atas pengetahuan lokal, tetapi justru memperkuat kemampuan mereka untuk mengelola arus informasi sesuai dengan kepentingan komunitas (Priyadharma, 2026).

Praktik tersebut memperluas pemahaman mengenai tata kelola media komunitas yang selama ini lebih banyak menekankan aspek partisipasi warga dan pengelolaan kolektif

(Rennie, 2006), (Rodríguez et al., 2014). Dalam kasus CIGA TV, partisipasi masyarakat memang menjadi elemen penting, tetapi partisipasi tersebut berlangsung di bawah kerangka otoritas adat yang menentukan batas, tujuan, dan arah komunikasi. Dengan demikian, legitimasi media tidak semata-mata berasal dari keterlibatan warga, tetapi juga dari pengakuan terhadap struktur sosial yang telah lama menjadi dasar kehidupan masyarakat Kasepuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola komunikasi berbasis adat tidak hanya mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mengatur hubungan antara komunitas dengan teknologi yang mereka gunakan.

Selain mengendalikan isi komunikasi, tata kelola CIGA TV juga terlihat pada upaya regenerasi sumber daya manusia. Produksi konten tidak bergantung pada satu individu, melainkan melibatkan pemuda-pemuda Kasepuhan yang secara bertahap belajar mengoperasikan kamera, melakukan penyuntingan video, hingga mendokumentasikan berbagai aktivitas adat. Proses pembelajaran tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan pemahaman mengenai etika komunikasi masyarakat adat. Priyadharma (2026) mencatat bahwa pelatihan produksi media dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, namun implementasinya tetap berada di bawah persetujuan dan pengawasan lembaga adat sehingga transfer pengetahuan teknologi selalu berjalan beriringan dengan pewarisan nilai-nilai budaya. Dengan demikian, regenerasi tidak hanya menghasilkan operator media baru, tetapi juga penjaga keberlanjutan sistem komunikasi komunitas.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa CIGA TV tidak sekadar merupakan media komunitas yang melayani kebutuhan informasi masyarakat adat. Lebih dari itu, CIGA TV merupakan institusi komunikasi yang dikelola melalui mekanisme tata kelola berbasis adat, di mana produksi, distribusi, dan pembatasan informasi diputuskan berdasarkan norma budaya yang telah hidup dalam komunitas. Dalam perspektif ini, teknologi digital tidak mengurangi otoritas masyarakat adat atas pengetahuan yang mereka miliki, tetapi justru menjadi instrumen untuk memperkuat kedaulatan komunikasi (*communication sovereignty*) komunitas. Konsep ini menegaskan bahwa hak suatu komunitas bukan hanya untuk memiliki media sendiri, tetapi juga untuk menentukan bagaimana pengetahuan diproduksi, siapa yang berhak mengaksesnya, dan dalam konteks apa pengetahuan tersebut boleh diedarkan. Oleh karena itu, tata kelola komunikasi CIGA TV memperlihatkan bahwa

inovasi teknologi dan kearifan lokal bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dapat dipadukan melalui mekanisme kelembagaan yang berakar pada otoritas budaya masyarakat adat.

Praktik Produksi dan Infrastruktur Komunikasi: Mewujudkan Tata Kelola Berbasis Adat

Tata kelola komunikasi berbasis adat yang menjadi landasan pengelolaan CIGA TV tidak berhenti pada proses pengambilan keputusan mengenai informasi yang dapat dipublikasikan, tetapi juga diwujudkan dalam praktik produksi media sehari-hari. Dengan kata lain, tata kelola tersebut diterjemahkan ke dalam cara masyarakat merencanakan, merekam, mengolah, dan mendistribusikan konten audiovisual. Dalam konteks ini, teknologi tidak diposisikan sebagai pusat aktivitas komunikasi, melainkan sebagai perangkat yang mendukung berlangsungnya praktik sosial masyarakat adat. Oleh karena itu, proses produksi di CIGA TV tidak dapat dipisahkan dari kehidupan komunitas, karena hampir seluruh kontennya lahir dari aktivitas budaya yang memang berlangsung secara alamiah dalam keseharian masyarakat Kasepuhan Gelaralam.

Berbagai program yang diproduksi CIGA TV merekam beragam dimensi kehidupan masyarakat adat, mulai dari pelaksanaan ritual adat, kegiatan pertanian, kesenian tradisional, musyawarah komunitas, pendidikan, hingga aktivitas sehari-hari warga. Pola produksi seperti ini menunjukkan bahwa CIGA TV tidak membangun realitas baru sebagaimana lazim dilakukan televisi komersial, tetapi mendokumentasikan realitas yang telah hidup di dalam komunitas. Dokumentasi audiovisual tersebut kemudian berfungsi sebagai arsip budaya sekaligus media pembelajaran bagi generasi muda. Media yang dikembangkan masyarakat Kasepuhan diarahkan untuk mendukung proses belajar, dokumentasi pengetahuan lokal, serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi tanpa menghilangkan karakter budaya yang menjadi identitas komunitas (Priyadharma, 2026). Dengan demikian, praktik produksi di CIGA TV memiliki orientasi utama pada keberlanjutan pengetahuan, bukan pada penciptaan komoditas media.

Yoyo Yogaswara menjelaskan bahwa proses produksi konten dilakukan secara sederhana dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di dalam komunitas. Seperti yang tertuang dalam kutipan wawancara berikut, *"Kami merekam apa yang memang sedang berlangsung di Kasepuhan. Tidak harus membuat acara yang rumit. Yang penting*

kegiatan adat terdokumentasikan dengan baik, masyarakat bisa melihatnya kembali, dan generasi berikutnya mempunyai rekaman tentang bagaimana kehidupan di sini dijalankan." (Yoyo Yogaswara, wawancara pribadi, 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa orientasi utama produksi CIGA TV bukanlah menciptakan tontonan yang spektakuler, melainkan menjaga kesinambungan memori kolektif masyarakat adat. Dokumentasi audiovisual dipahami sebagai bagian dari proses pewarisan budaya, sehingga nilai sebuah produksi tidak ditentukan oleh kompleksitas teknis ataupun kualitas sinematik semata, tetapi oleh kemampuannya merepresentasikan kehidupan masyarakat secara autentik. Temuan ini memperkuat pandangan Rodriguez, Ferron, dan Shamas (2014) bahwa media komunitas memperoleh maknanya bukan karena kecanggihan teknologinya, melainkan karena kemampuannya merepresentasikan pengalaman dan kepentingan komunitas yang memproduksinya.

Praktik produksi tersebut juga menunjukkan bahwa infrastruktur komunikasi di Kasepuhan Gelaralam dibangun berdasarkan prinsip kecukupan (*appropriateness*) dan kebermanfaatannya, bukan berdasarkan logika akumulasi teknologi. Berbagai perangkat seperti kamera digital, komputer penyuntingan, jaringan internet, dan platform berbagi video dimanfaatkan sebagai alat untuk mendukung kebutuhan komunikasi masyarakat. Teknologi dipilih sejauh mampu membantu proses dokumentasi, penyimpanan, dan distribusi informasi tanpa mengubah orientasi utama media sebagai milik komunitas. Penelitian mengenai masyarakat adat Ciptagelar yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi modern, termasuk internet dan media digital, tidak dipahami sebagai simbol modernitas, melainkan sebagai sarana untuk meneruskan tradisi kepada generasi berikutnya (Trisfian, 2024).



Gambar 3. Area pascaproduksi program-program CIGA TV

Sumber: Dokumentasi Penulis

Aspek yang menarik dari praktik produksi CIGA TV adalah kemampuannya menghubungkan infrastruktur komunikasi lokal dengan ekosistem media digital global. Konten-konten yang diproduksi masyarakat tidak hanya didistribusikan melalui jaringan komunikasi internal, tetapi juga dipublikasikan melalui kanal YouTube CIGA TV sehingga dapat diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Kehadiran platform digital memperluas jangkauan komunikasi komunitas tanpa menghilangkan kontrol masyarakat adat terhadap isi pesan yang dipublikasikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Priyadharma (2026), media digital dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi dengan dunia luar, sementara proses seleksi informasi tetap berada di bawah kewenangan komunitas. Dengan demikian, digitalisasi tidak menggeser otoritas adat, tetapi memperluas ruang bagi masyarakat adat untuk menyampaikan narasi mereka sendiri kepada publik.

Praktik ini memperlihatkan bahwa infrastruktur komunikasi di Kasepuhan Gelaralam tidak dapat dipahami semata sebagai kumpulan perangkat teknis. Infrastruktur tersebut juga mencakup jaringan sosial, aturan adat, pembagian peran, dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan teknologi bekerja sesuai dengan tujuan komunitas. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Couldry dan Hepp (2018) yang memandang infrastruktur media sebagai bagian dari proses pembentukan praktik sosial, di mana teknologi selalu beroperasi melalui relasi sosial yang mengaturnya. Dalam kasus CIGA TV, kamera, komputer, jaringan internet, dan platform digital memperoleh makna karena ditempatkan di dalam sistem sosial masyarakat adat yang mengendalikan cara teknologi tersebut digunakan.

Dengan demikian, praktik produksi dan infrastruktur komunikasi CIGA TV menunjukkan bahwa keberhasilan media komunitas tidak ditentukan oleh tingkat kecanggihan teknologi yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan komunitas mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem sosial dan budaya yang telah mereka bangun. Produksi konten, penggunaan perangkat audiovisual, serta distribusi melalui platform digital seluruhnya dijalankan sebagai bagian dari tata kelola komunikasi berbasis adat yang menempatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat keberlanjutan komunitas, bukan sebagai tujuan akhir. Oleh karena itu, praktik produksi CIGA TV memperlihatkan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian nilai-nilai budaya selama arah penggunaannya tetap berada di bawah kendali masyarakat adat.

Menjaga Keberlanjutan Sistem Komunikasi Masyarakat Adat melalui Tata Kelola Berbasis Adat

Keberadaan CIGA TV pada akhirnya tidak hanya dapat dipahami sebagai keberhasilan masyarakat adat mengadopsi teknologi komunikasi, tetapi juga sebagai upaya membangun keberlanjutan sistem komunikasi yang menopang kehidupan komunitas. Seluruh praktik yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya—mulai dari falsafah *ngigelan jaman*, pembentukan televisi komunitas, tata kelola komunikasi, hingga praktik produksi dan pemanfaatan infrastruktur digital—memperlihatkan bahwa teknologi ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kesinambungan pengetahuan, identitas budaya, dan relasi sosial masyarakat Kasepuhan Gelaralam. Dalam perspektif ini, keberlanjutan tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan mempertahankan eksistensi media, tetapi sebagai kemampuan komunitas mempertahankan sistem komunikasi yang memungkinkan nilai-nilai adat terus diproduksi, dipraktikkan, dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Rennie, 2006), (Rodríguez et al., 2014).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi banyak masyarakat adat di era digital adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dengan perlindungan terhadap pengetahuan budaya. Digitalisasi membuka peluang yang luas bagi komunitas untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan tradisi mereka, tetapi pada saat yang sama juga menghadirkan risiko terjadinya penyederhanaan makna budaya, komodifikasi identitas, maupun hilangnya kendali masyarakat atas informasi yang mereka miliki. Oleh karena itu, keberlanjutan komunikasi tidak hanya bergantung pada kemampuan mengakses teknologi, tetapi juga pada kemampuan komunitas mengatur proses produksi, distribusi, dan penggunaan informasi sesuai dengan sistem nilai yang mereka anut (Priyadharma, 2026).

Pandangan tersebut tercermin dalam penjelasan Yoyo Yogaswara mengenai alasan masyarakat Kasepuhan terus mengembangkan media komunitas mereka. Menurutnya, tujuan utama penggunaan teknologi bukanlah mengejar perkembangan teknologi itu sendiri, melainkan memastikan bahwa pengetahuan adat tetap dapat dipahami dan diteruskan oleh generasi muda.

"Kalau tidak didokumentasikan, nanti anak cucu hanya mendengar cerita. Dengan adanya rekaman, mereka bisa melihat langsung bagaimana adat dijalankan. Tapi yang lebih penting, mereka juga harus mengerti maknanya. Karena itu teknologi hanya alat, sedangkan adat tetap

menjadi pegangan kami." (Yoyo Yogaswara, wawancara pribadi, 2026)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama pengembangan CIGA TV bukan terletak pada produksi media sebagai tujuan akhir, melainkan pada keberlanjutan proses pewarisan pengetahuan. Dokumentasi audiovisual dipahami sebagai media yang membantu memperpanjang daya ingat kolektif masyarakat, tetapi keberhasilan pewarisan budaya tetap ditentukan oleh kemampuan komunitas mempertahankan makna yang terkandung dalam setiap praktik adat. Dengan demikian, teknologi memperoleh legitimasi bukan karena sifatnya yang modern, tetapi karena kemampuannya mendukung proses transmisi pengetahuan yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kasepuhan.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan sistem komunikasi masyarakat adat dibangun melalui hubungan yang saling menguatkan antara tiga unsur utama, yaitu nilai budaya, kelembagaan adat, dan teknologi komunikasi. Nilai budaya menyediakan kerangka normatif yang menentukan arah penggunaan teknologi melalui falsafah *ngigelan jaman*. Kelembagaan adat memastikan bahwa setiap keputusan mengenai produksi dan distribusi informasi tetap berada dalam pengawasan komunitas. Sementara itu, teknologi komunikasi menyediakan sarana untuk mendokumentasikan, menyimpan, serta memperluas jangkauan penyebaran pengetahuan lokal. Ketiga unsur tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan membentuk suatu sistem komunikasi yang memungkinkan masyarakat adat beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan kendali atas identitas budayanya.

Dalam konteks tersebut, CIGA TV dapat dipahami sebagai bagian dari strategi komunikasi jangka panjang masyarakat adat dalam membangun ketahanan budaya (*cultural resilience*). Berbagai penelitian mengenai media masyarakat adat menunjukkan bahwa media komunitas memiliki peran penting dalam memperkuat identitas kolektif, memperluas partisipasi masyarakat, dan menciptakan ruang representasi yang tidak selalu tersedia dalam media arus utama (Ginsburg, 2019), (Gordon & Lopez, 2019), (Rodríguez et al., 2014). Akan tetapi, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan budaya tersebut tidak hanya dihasilkan oleh keberadaan media komunitas, melainkan oleh tata kelola komunikasi yang mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem sosial masyarakat adat. Dengan kata lain, yang membuat CIGA TV berkelanjutan bukan terutama karena masyarakat memiliki kamera, jaringan

internet, atau kanal YouTube, melainkan karena seluruh perangkat tersebut dioperasikan berdasarkan norma, struktur kelembagaan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang berakar pada adat.

Temuan ini sekaligus memperluas pembahasan mengenai media komunitas dalam kajian komunikasi. Literatur selama ini umumnya menempatkan partisipasi warga, akses terhadap teknologi, dan pemberdayaan komunitas sebagai karakteristik utama media komunitas (Rennie, 2006), (Rodríguez et al., 2014). Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat adat, keberlanjutan media juga sangat bergantung pada tata kelola komunikasi berbasis adat, yaitu seperangkat nilai, aturan, dan mekanisme kelembagaan yang mengarahkan bagaimana teknologi digunakan, siapa yang berwenang mengelola informasi, serta bagaimana pengetahuan lokal didistribusikan kepada publik. Dengan demikian, kontribusi utama CIGA TV tidak hanya terletak pada keberhasilannya memanfaatkan media digital, tetapi pada kemampuannya menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap inovasi teknologi dan perlindungan terhadap kedaulatan budaya komunitas.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan sistem komunikasi masyarakat adat bukan merupakan konsekuensi otomatis dari adopsi teknologi digital. Sebaliknya, keberlanjutan tersebut dibangun melalui tata kelola komunikasi berbasis adat yang memastikan bahwa setiap inovasi teknologi tetap berada di bawah kendali nilai-nilai budaya masyarakat Kasepuhan Gelaralam. Dalam perspektif ini, CIGA TV bukan hanya sebuah televisi komunitas, melainkan sebuah institusi komunikasi yang memungkinkan masyarakat adat mengelola perubahan secara mandiri, memperkuat identitas kolektif, dan menjaga kesinambungan pengetahuan lokal di tengah perkembangan ekosistem media digital.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan CIGA TV tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk adopsi teknologi komunikasi oleh masyarakat adat Kasepuhan Gelaralam ataupun sebagai media pelestarian budaya. Sebaliknya, CIGA TV merupakan manifestasi dari tata kelola komunikasi berbasis adat yang memungkinkan masyarakat mengintegrasikan perkembangan teknologi ke dalam sistem sosial dan budaya mereka tanpa menghilangkan otoritas adat sebagai dasar pengambilan keputusan. Temuan ini memperlihatkan bahwa

falsafah *kudu bisa ngigelan jaman, tapi ulah kabawa ku jaman* bukan sekadar prinsip normatif, melainkan menjadi landasan yang mengarahkan bagaimana teknologi dipilih, dimanfaatkan, dan dikendalikan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi komunitas.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan CIGA TV tidak terutama ditentukan oleh kecanggihan infrastruktur komunikasi yang dimiliki, tetapi oleh kemampuan masyarakat adat membangun hubungan yang saling menguatkan antara nilai budaya, kelembagaan adat, tata kelola komunikasi, serta praktik produksi media. Melalui mekanisme tersebut, teknologi digital tidak diposisikan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen untuk memperkuat dokumentasi pengetahuan lokal, memperluas ruang komunikasi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan sistem komunikasi yang menopang kehidupan komunitas. Dengan demikian, media komunitas dalam konteks masyarakat adat tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai institusi komunikasi yang menjaga kesinambungan identitas, memori kolektif, dan otoritas budaya komunitas.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian media komunitas dengan menawarkan perspektif tata kelola komunikasi berbasis adat (*indigenous communication governance*) sebagai lensa untuk memahami hubungan antara masyarakat adat dan teknologi komunikasi. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menekankan fungsi media komunitas sebagai sarana pelestarian budaya atau pemberdayaan masyarakat, penelitian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan media komunitas sangat ditentukan oleh mekanisme tata kelola yang mengatur bagaimana teknologi diintegrasikan ke dalam sistem nilai, struktur kelembagaan, dan praktik komunikasi masyarakat adat. Dengan demikian, keberlanjutan media bukan semata-mata merupakan persoalan akses terhadap teknologi, melainkan juga kemampuan komunitas mempertahankan kendali atas proses produksi, distribusi, dan pemaknaan informasi.

Secara praktis, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengembangan media komunitas pada masyarakat adat sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur teknologi atau peningkatan kapasitas teknis produksi media. Dukungan terhadap media komunitas juga perlu memperhatikan sistem tata kelola lokal yang telah berkembang di dalam komunitas, sehingga proses digitalisasi tidak menggeser nilai-nilai budaya maupun mekanisme pengambilan keputusan yang menjadi fondasi

kehidupan masyarakat adat. Pendekatan semacam ini memungkinkan inovasi teknologi berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan budaya dan kedaulatan komunitas atas pengetahuan yang mereka miliki.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu studi kasus, yaitu CIGA TV di Kasepuhan Gelaralam, sehingga temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada seluruh media komunitas masyarakat adat di Indonesia. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada perspektif pengelola media dan belum mengeksplorasi secara mendalam pengalaman khalayak internal maupun eksternal dalam memaknai konten CIGA TV.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi komparatif antara berbagai media komunitas masyarakat adat di Indonesia guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan model tata kelola komunikasi yang diterapkan pada masing-masing komunitas. Penelitian berikutnya juga dapat mengeksplorasi bagaimana khalayak, khususnya generasi muda masyarakat adat, memaknai keberadaan media komunitas dalam proses pewarisan budaya di era digital. Selain itu, kajian mengenai hubungan antara tata kelola komunikasi berbasis adat, platform digital, dan kedaulatan data masyarakat adat (*Indigenous Data Sovereignty*) juga menjadi arah penelitian yang menjanjikan, mengingat semakin besarnya peran platform digital dalam mendistribusikan pengetahuan lokal kepada publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Couldry, N., & Hepp, A. (2018). *The Mediated Construction of Reality*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2017). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5 ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Ginsburg, F. D. (2019). 1. Screen Memories: Resignifying the Traditional in Indigenous Media. In F. D. Ginsburg, L. Abu-Lughod, & B. Larkin (Ed.), *Media Worlds* (hal. 37–57). Berkeley: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520928169-004>
- Gordon, E., & Lopez, R. A. (2019). The Practice of Civic Tech: Tensions in the Adoption and Use of New Technologies in Community Based Organizations. *Media and*

- Communication*, 7(3), 57–68. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i3.2180>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd Editio). Los Angeles: SAGE Publications.
- Latif, F. (2023). Tradisi Ngalalakon, Pemindahan Pusat Pemerintahan Kasepuhan Ciptagelar. Diambil 3 Agustus 2026, dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/133682922/tradisi-ngalalakon-pemindahan-pusat-pemerintahan-kasepuhan-ciptagelar?page=all>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. London: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th Editio). Los Angeles: SAGE Publications, Inc.
- Priyadharma, S. (2024). “Periphery-Centric” Approach as a Tactic for Everyday Digital In- and Exclusion of Indonesian Villages. *Media and Communication*, 12. <https://doi.org/10.17645/mac.8162>
- Priyadharma, S. (2026). *Community media as custodians of the ancestral order: A case study of Radio Swara and CIGA TV in Kasepuhan Gelaralam (Indonesia). Community interest media: Emerging concepts and practices from the Global Majority (and friends)*. The Association for Progressive Communications (APC). Diambil dari <https://www.apc.org/en/pubs/community-interest-media-emerging-concepts-and-practices-global-majority-and-friends>
- Rachman, I., A.M Babys, S., & Faisyal. (2025). Analisis CigaTV Sebagai Televisi Komunitas dalam Melestarikan Identitas Masyarakat Adat Kasepuhan Ciptagelar. *Jurnal Media Penyiaran*, 5(2), 7–14. <https://doi.org/10.31294/jmp.v5i2.11365>
- Rennie, L. (2006). The community’s contribution to science learning: Making it count. In *2006 - Boosting Science Learning - What will it take?* ACEReSearch. Diambil dari https://research.acer.edu.au/research_conference_2006/8/
- Rodríguez, C., Ferron, B., & Shamas, K. (2014). Four challenges in the field of alternative, radical and citizens’ media research. *Media, Culture & Society*, 36(2), 150–166. <https://doi.org/10.1177/0163443714523877>
- Roveri, F. (2026). Community interest media’s contribution to digital inclusion: Learning from experience. Diambil 3 Agustus 2026, dari <https://www.apc.org/en/news/community-interest-medias-contribution-digital-inclusion-learning-experience>
- Stake, R. E. (2009). Studi kasus. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Ed.), *Handbook of qualitative research* (hal. 299–315). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tifani. (2023). Miliki Stasiun TV Sendiri, Ini 6 Fakta Menarik Kampung Adat Ciptagelar. Diambil 3 Agustus 2026, dari <https://www.liputan6.com/regional/read/5220204/miliki-stasiun-tv-sendiri-ini-6-fakta-menarik-kampung-adat-ciptagelar>
- Trisfian, D. (2024). Mahasiswa UGM Teliti Keunikan Masyarakat Adat Sukabumi Jawa Barat yang Menggunakan Teknologi sebagai Sarana Meneruskan Tradisi. Diambil 3 Agustus 2026, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/mahasiswa-ugm-teliti-keunikan-masyarakat-adat-sukabumi-jawa-barat-yang-menggunakan-teknologi-sebagai-sarana-meneruskan-tradisi/>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. SAGE Publication (Sixth edit). London.